



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN ANGGARAN 2026



**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SERUYAN**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur pertama-tama kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat, hidayah dan inayahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan Tahun 2025 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis 2024-2026 dapat diselesaikan.

Laporan ini dibuat berdasarkan rencana kerja tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 yang terdiri dari 8 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Hubungan Industrial, Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi . Rencana Strategis 2024-2026 dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) 2025 yang didalamnya mencakup kegiatan - kegiatan yang terdapat dalam DPA dan DPPA tahun 2025 dan laporan ini dimaksudkan sebagai evaluasi bagi kami dan pihak lain yang berkompeten mengenai akuntabilitas pelaksanaan Rencana Kinerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan.

Kami telah berusaha menyampaikan laporan subjektif mungkin akan tetapi kami sadari masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan koreksi dan saran konstruktif dari semua pihak demi peningkatan kinerja dan kesempurnaan laporan yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2025 ini dibuat, semoga dapat bermanfaat.

Kuala Pembuang, 23 Maret 2026

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Seruyan.



**IDHAM BW USUMAH, SE., MSM**  
Pembina Muda Muda (IVc)  
NIP. 19760708 199902 1 001



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan Tahun 2025

Adapun dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta



- Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;



20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 – 2039;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005 – 2025.
24. Peraturan Bupati Seruyan Nomor                      Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan.

Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Seruyan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan yaitu Menjamin hak-hak masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan, maka dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan menetapkan sasaran strategis melalui Perencanaan Kinerja Tahun 2025 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas kesempatan kerja;
2. Mewujudkan usaha yang menerapkan pembayaran sesuai UMK;
3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi/ eks transmigrasi yang dibina;

Dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

1. Persentase tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan;
2. Persentase perusahaan yang menerapkan UMK;
3. Persentase Tingkat kesejahteraan masyarakat transmigrasi/ eks transmigrasi yang dibina;


Kegiatan, program dan kebijakan untuk mencapai sasaran strategis tersebut yang dijabarkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan Tahun 2025, maka hasil yang telah dicapai diperoleh dengan pengukuran realisasi kinerja sebesar **484,35** persen dari target sasaran yang ditetapkan **86,66** persen.



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan tahun 2025 yang dapat kami sajikan sebagai gambaran pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 semoga dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak yang berkepentingan dan untuk masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mohon diberikan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Kuala Pembuang, 23 Maret 2026  
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Seruyan

  
**IDHAM BW KUSUMAH, SE., MSM**  
Pembina Utama Muda (II/c)  
NIP. 19760708199021001



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	vi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	1
A. Gambaran Umum	1
B. Fungsi Strategis Organisasi	6
C. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan	6
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b>	9
A. Perencana Kinerja yang tertuang pada Perubahan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026	9
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	15
A. Capaian Indikator Kinerja Utama	15
B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	18
C. Realisasi Anggaran ( Akuntabilitas Keuangan )	35
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	38
A. Kesimpulan	38
B. Saran	38



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Gambaran Umum**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2021 mempunyai tugas dan melaksanakan kebijakan operasional ketenagakerjaan dan transmigrasi. Dengan kompleksnya masalah ini maka dipandang perlu untuk ditangani secara seksama dalam pengendaliannya dan melibatkan semua untuk yang ada.

Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan, tidak terlepas dari kerja sama yang baik antar sesama personil juga koordinasi yang dilaksanakan oleh pimpinan Instansi sebagai penanggungjawab semua kegiatan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Tugas Pokok : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas dan melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- b. Fungsi : Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi sebagai berikut:
  1. Merumuskan kebijakan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian teknis di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
  2. Menyelenggarakan kebijakan ketenagakerjaan dibidang penempatan dan perluasan kerja, dibidang pelatihan dan produktivitas, dibidang hubungan Industrial dan syarat kerja, dibidang penempatan dan pengawasan norma kerja, serta norma keselamatan dan kesehatan kerja;
  3. Merumuskan pelaksanaan kebijakan pemberian ijin dan rekomendasi pada pengarah tenaga kerja keluar negeri, peraturan perusahaan, lembaga serikat kerja maupun organisasi serikat dan asosiasi pengusaha;  
Pembinaan jaminan sosial tenaga kerja, pembinaan pendidikan ketrampilan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif;  
Pembinaan bursa kerja yang kondusif hingga pertambahan angkatan kerja dapat terserap pada lowongan kerja yang tersedia diberbagai sektor ekonomi;  
Pembinaan, Koordinasi dan pengendalian, penyiapan pemukiman transmigrasi;



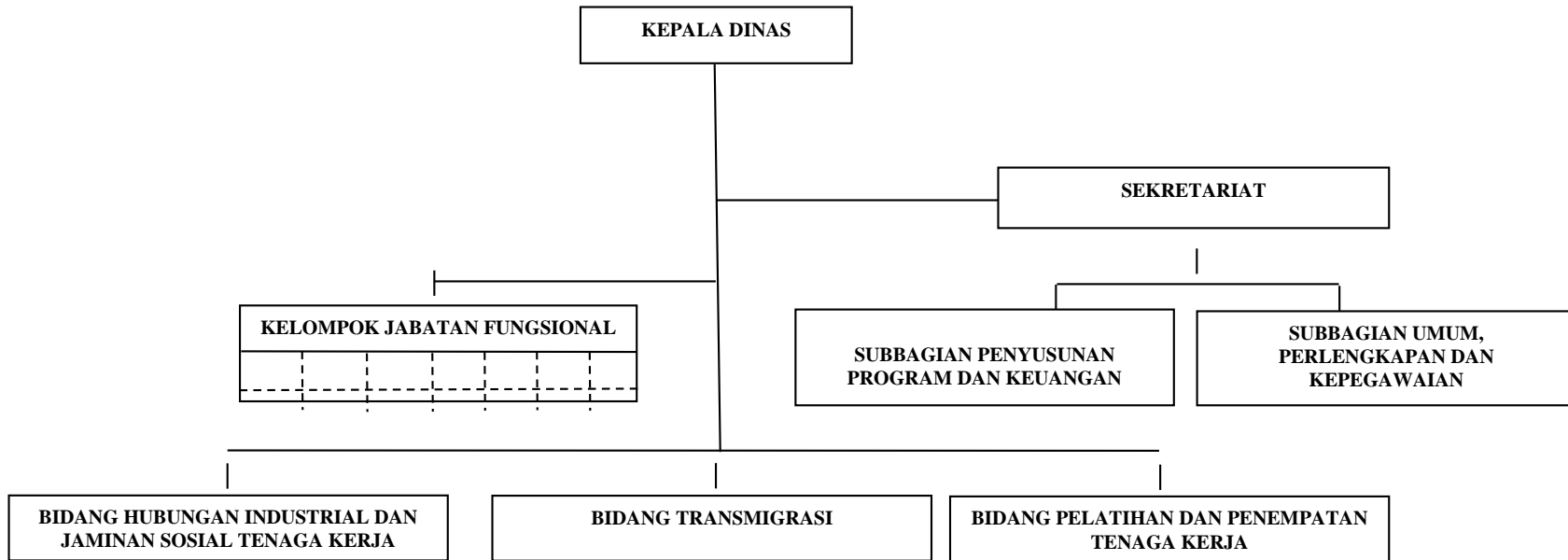
Pembinaan, Koordinasi dan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi;

Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.

Dengan struktur organisasi sebagai berikut:



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SERUYAN**



Kuala Rejang, 25 Maret 2026  
Kepala Dinas

**IDHAM BURKUSUMAH SE., MSM**  
Pembina Utama Muda (IVc)  
NIP. 19760708 199902 1 001



Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu lingkungan strategis yang mempengaruhi pelaksanaan tugas/ fungsi suatu organisasi dalam hal ini ketersediaan SDM pada Disnakertrans tahun 2025. Terdapat 65 orang pegawai dengan komposisi 33 orang Pegawai Negeri Sipil / PPPK atau 50,76 persen dan 32 Orang tenaga kontrak / honorer atau 49,23 persen.

NO.	PANGKAT	GOLONGAN	JLM PERSONIL (ORG)
1	2	4	5
1	Pembina Utama Muda	IV c	1
2	Pembina Tk.I	IV b	-
3	Pembina	IV a	5
4	Penata Tk.I	III d	5
5	Penata	III c	6
6	Penata Muda Tk.I	III b	4
7	Penata Muda	III a	8
8	Pengatur Tk.I	II d	-
9	Pengatur	II c	1
10	Pengatur Muda Tk.I	II b	-
11	Pengatur Muda	II a	-
12	Juru Muda Tk.I	I b	-
13	Golongan VIII ( P3K)	-	1
14	Golongan VII ( P3K )		2
15	Tenaga Kontrak		<b>32</b>
	<b>T O T A L</b>		<b>65</b>

Berdasarkan tabel diatas, posisi Pegawai Kontrak/ Honorer di tahun 2025 berjumlah 32 orang, dengan personil sebagai berikut :

- Tenaga Kontrak Administrasi = 18 Orang
- Tenaga Kontrak Sopir = 1 Orang
- Tenaga kontrak Cleaning Servis dan Tukang Kebun = 10 Orang
- Tenaga Kontrak Petugas Keamanan = 4 Orang

Seluruh posisi jabatan Esselon II, III & IV di Disnakertrans Kabupaten Seruyan telah terisi ditambah dengan 8 orang Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional, yaitu Jabatan Fungsional Perencana, Pengantar Kerja, Penggerak Swadaya Masyarakat, Mediator dan Instruktur.



Adapun analisis efisiensi sumber daya yang menduduki jabatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut :

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN SEHARUSNYA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG TERISI	KET.
1.	Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	S-1 Administrasi, Hukum, Politik, Sosial, Pemerintahan, Manajemen	S-1 Psikologi dan Magister Manajemen	Masih sesuai
2.	Kabid Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja	S-1 Administrasi, Hukum, Politik, Sosial, Pemerintahan, Manajemen	S-1 Kehutanan	Tidak sesuai
3.	Kabid Transmigrasi	S-1 Administrasi, Hukum, Politik, Sosial, Pemerintahan, Manajemen	S-1 Sosial	Sesuai
4.	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	S-1 Administrasi, Hukum, Politik, Sosial, Pemerintahan, Manajemen	S-1 Pertanian	Tidak sesuai
5.	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	S-1 Administrasi, Hukum, Politik, Sosial, Pemerintahan, Manajemen	S-1 Kesehatan Masyarakat dan Magister Manajemen	Masih sesuai
6.	Pengantar Kerja Ahli Muda	S-1 Administrasi, Hukum, Politik, Sosial, Pemerintahan, Manajemen	S-1 Ekonomi dan Magister Manajemen	Sesuai
7.	Pengantar Kerja Ahli Muda	S-1 Administrasi, Hukum, Politik, Sosial, Pemerintahan, Manajemen	S-1 Teknik Geodesi	Tidak sesuai
8.	Kepala UPTD Balai Latihan Kerja	S-1 Administrasi, Hukum, Politik, Sosial, Pemerintahan, Manajemen	S-1 Ilmu Pemerintahan	Sesuai



NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN SEHARUSNYA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG TERISI	KET.
9.	Kepala UPTD Ketenagakerjaan	S-1 Administrasi, Hukum, Politik, Sosial, Pemerintahan, Manajemen	S-1 Ekonomi	Sesuai
10.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	S-1 Administrasi, Hukum, Politik, Sosial, Pemerintahan, Manajemen	S-1 Teknik Industri dan Magister Manajemen	Masih sesuai
11.	Perencana Ahli Muda	S-1 Ilmu Pemerintahan	S-1 Ilmu Politik Jurusan Ilmu Komunikasi	Masih sesuai
12.	Instruktur	S-1 Teknik	S-1 Teknik	Sesuai
13.	Kasubbag Program & Keuangan	S-1 Ilmu Ekonomi	S-1 Ilmu Ekonomi	Sesuai
14.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	S-1 Ilmu Pemerintahan	Ahli Madya	Tidak Sesuai

Sumber daya manusia pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan belum semuanya sesuai dengan Kualifikasi Pendidikan yang seharusnya, namun masih bisa diberdayakan untuk pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan.

b. Sarana dan Prasarana

Masih belum optimalnya sarana dan prasarana di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan karena banyaknya perangkat yang tidak bisa beroperasi dengan baik yang disebabkan masa pemakaian yang sudah terlalu lama. Untuk penggantian perangkat baru tidak memungkinkan dalam jumlah yang banyak, karena keterbatasan anggaran.

c. Anggaran

Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berasal dari APBD Kabupaten Seruyan masih terbatas hingga menyebabkan banyak kegiatan teknis yang tidak optimal.

- Anggaran APBD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2025 sebesar Rp. 7.663.455.347,-

**B. Fungsi Strategis Organisasi**

Berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan dimaksud, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan



secara umum memiliki fungsi strategis yaitu melaksanakan kebijakan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

### **C. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan**

Adapun permasalahan utama yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan yang harus diselesaikan dan dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian secara singkat dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **i. Ketenagakerjaan**

- a. Masih terjadi ketimpangan pasar kerja yang ditandai dengan kelebihan tenaga kerja, disebabkan terutama oleh struktur ekonomi yang belum mampu menyerap seluruh angkatan kerja yang ada;
- b. Masih kurangnya mutu dan produktivitas tenaga kerja;
- c. Kurangnya semangat dan jiwa kewirausahaan bagi penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru;
- d. Iklim investasi untuk mendorong perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja masih perlu ditumbuhkan;
- e. Belum sinkronnya pembangunan pendidikan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
- f. Masih adanya kasus perselisihan Hubungan Industrial antar Pekerja dan Pengusaha, sehingga perlu mewujudkan hubungan industrial yang harmonis.

#### **ii. Ketransmigrasian**

- a. Kerjasama antar pemerintah dan swasta dalam pengembangan transmigrasi belum optimal;
- b. Masih perlunya pembinaan masyarakat di wilayah transmigrasi khususnya pembinaan usaha dan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah transmigrasi yang juga memberi pengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat secara luas
- c. Belum tersedianya tenaga penyuluh dan belum optimalnya Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat untuk peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di kawasan transmigrasi;

### **D. Sistematika LKjIP**

Memperhatikan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKjIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan Tahun 2025 disusun dengan Sistematika penulisan sebagai berikut :



## **KATA PENGANTAR**

### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Menyajikan tujuan dan sasaran utama yang telah ditetapkan sesuai Rencana Strategis PD Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Peraturan daerah Kabupaten Seruyan Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2025

### **DAFTAR ISI**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini menyajikan penjelasan umum dan dengan penekanan kepada aspek-aspek strategis serta permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi Perangkat Daerah Tahun 2025

#### **BAB II PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA**

Bab ini menjelaskan tentang beberapa hal penting dalam perencanaan dan penetapan kinerja (dokumen penetapan kinerja)

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menguraikan akuntabilitas kinerja tahun 2025, ditinjau dari hasil pengukuran capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran tahun 2025

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menjelaskan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Kinerja yang tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026**

Perencanaan Kinerja Tahun 2025 pada Penetapan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan Tahun 2025 disesuaikan dengan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2025, Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi, serta Peraturan Bupati Seruyan Nomor 28 Tahun 2025 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan. Dengan kompleksnya masalah ini maka dipandang perlu untuk ditangani secara seksama dalam pengendaliannya dan melibatkan semua unsur yang ada.

Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029. Ada dua aspek yang tertuang dalam RPD yang menyajikan indikator kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan yaitu aspek kesejahteraan Masyarakat dan aspek pelayanan umum.

#### **I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Indikator ini untuk melihat berapa persen pengangguran terbuka di Kabupaten Seruyan setiap tahun. Pengangguran terbuka adalah baik sukarela (mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik) maupun secara terpaksa (mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan). Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk angkatan kerja dikali dengan 100%.

Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2025 belum rilis, untuk data sementara yang dipakai Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2024 yaitu **3,67%**



No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Tiga Tahun		
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
4.	<b>Ketenagakerjaan</b>			
4.1	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</b>	<b>3,86%</b>	<b>3,81%</b>	<b>3,75%</b>

Berdasarkan tabel 2.1 dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Seruyan setiap tahunnya ditargetkan mengalami peningkatan dengan harapan Angkatan Kerja lebih besar dari penduduk bukan angkatan kerja, semakin kecil angka target diharapkan semakin sedikit angka pengangguran.

## II. ASPEK PELAYANAN UMUM

No.	FOKUS/BIDANG INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN/ KINERJA	Target Capaian Tiga Tahun			Target Capaian Tiga Tahun
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
<b>14</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>					
14.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		54,44%	55,80%	57,19%	<b>57,19%</b>
14.2	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi		0,50%	0,75%	1,00%	<b>1,00%</b>
14.3	Tingkat produktivitas tenaga kerja		0,10%	0,15%	0,20%	<b>0,20%</b>
14.5	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		20,88%	21,09%	21,30%	<b>21,30%</b>
14.6	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/ Kota		14,56%	15,56%	16,56%	<b>16,56%</b>

Pada aspek pelayanan umum terdapat enam indikator kinerja yang sebagian besar terdapat pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026.



**B. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2025 SEPERTI YANG TERTUANG PADA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024 - 2026**

Perencanaan Kinerja Tahun 2025 yang dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan Tahun 2025 yang disesuaikan dengan besaran anggaran yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2025 dan dengan memperhatikan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesempatan antara penerima dan pemberi Amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 beserta program pendukung dapat kita lihat pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2

**PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2025  
(Perjanjian Kinerja)**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025	Program 2025	Kegiatan 2025	Sub Kegiatan 2025
1.	Meningkatnya Kualitas Kesempatan Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	85%	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Uji Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
						Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025	Program 2025	Kegiatan 2025	Sub Kegiatan 2025
						untuk Penyediaan Insruktur Serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
						Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten / Kota
					Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
						Perluasan Kesempatan Kerja
					Pegelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
					Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025	Program 2025	Kegiatan 2025	Sub Kegiatan 2025
2.	Mewujudkan Usaha yang menerapkan pembayaran sesuai UMK	Persentase Perusahaan yang menerapkan UMK	100%	Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah/ Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota
						Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025	Program 2025	Kegiatan 2025	Sub Kegiatan 2025
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Transmigrasi/ eks transmigrasi yang dibina	Persentase Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Transmigrasi/ Eks Transmigrasi yang dibina	80%	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota



### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan Perangkat Daerah (PD) dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran, yang hasilnya akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi Upaya perbaikan kinerja instansi pemerintah. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Instansi Pemerintah wajib Menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah kepada masyarakat. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan juga mempunyai kewajiban memuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berpedoman pada pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi yang diambil dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah terlaksana pada tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Utama dalam Perencanaan Kinerja berdasarkan perbandingan realisasi dan target kinerja seperti pada tabel 3.1 menunjukkan bahwa kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan menyesuaikan dengan anggaran yang telah dialokasikan.

#### ✚ Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Trasn migrasi Kabupaten Seruyan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026.

Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan pada perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan beberapa tahun terakhir pada target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

#### I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

No.	FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Tiga Tahun			Kinerja Capaian s/d tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Pembangunan Daerah
		Tahun 2024 (%)	Tahun 2025 (%)	Tahun 2026 (%)	Tahun 2024 (%)	Tahun 2025 (%)	Tahun 2026 (%)	
4.	Ketenagakerjaan							
4.1	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</b>	<b>3,86</b>	<b>3,81</b>	<b>3,75</b>	<b>3,47</b>	Data dari BPS BIm tersedia		



Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2025 belum tersedia dari BPS, sementara menggunakan data Tahun 2024 sebesar **3,47** persen.

No.	FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Tiga Tahun			Kinerja Capaian Tahun Sebelumnya	Kinerja Capaian s/d Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD s/d 2026
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
		14	Ketenagakerjaan						
14.2	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	54,44%	55,80%	57,19%	-	28,33%	69,86%		
14.3	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	0,50%	0,75%	1,00%	-	1,10%	1,76%		
14.4	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	0,10%	0,15%	0,20%	-	32,13%	31,30%		
14.5	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/KB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	14,56%	15,56%	16,56%	-	47,61%	100%		
14.6	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota)	14,56	15,56	16,56	-	14,44%	<b>1.278,80%</b>		

Capaian Aspek Pelayanan Umum pada capaian ketenagakerjaan secara umum tercapai dengan baik.

#### **Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan Tahun 2025**

Capaian Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2025 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan Sasaran Strategis Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 mengacu pada perubahan Rencana Strategis tersebut tersusunlah perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan Tahun 2025. Adapun capaian Indikator Kinerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan dapat dilihat pada tabel 3.1



Tabel 3.1

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Tahun 2025
1.	Meningkatnya Kualitas Kesempatan Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	- 85%	- 1.278,80 %	- 1.504,47% (pada tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan mengangkat Tenaga Kontrak Daerah Menjadi PPPK Paruh Waktu, sehingga jumlah pencaker yang ditempatkan lebih banyak dari pada pencaker yang terdaftar, karena Tenaga Kontrak Daerah membuat Kartu AKI pada Tahun 2024 untuk tes pengangkatan PPPK Paruh Waktu 2025.
2.	Mewujudkan Usaha yang menerapkan pembayaran sesuai UMK	Persentase Perusahaan yang menerapkan UMK	- 100%	- 100%	- 100%
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Transmigrasi/Eks Transmigrasi yang dibina	Persentase Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Transmigrasi/ Eks Transmigrasi yang di bina	- 75%	- 74,25%	- 99%

Dari tabel diatas dapat dihitung rata-rata Realisasi Perencanaan Kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar **484,35%** dari rata rata target **86,66%** yang secara umum kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan sudah tercapai, ini berarti bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan baik melalui program, kegiatan dan sub kegiatan maupun upaya lainnya sudah efektif, walaupun dengan keterbatasan anggaran yang tersedia di bidang yang bersangkutan.



## B. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

### ✚ Analisis dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026

#### ❖ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 Tahun ke atas) yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran, dimana pada tahun 2025 data yang tercatat pada Badan Pusat Statistik untuk capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) belum keluar. Data dapat dilihat pada table dibawah ini :

No.	Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Tahun 2025
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	- 3,81%	- 3,47% (menggunakan Data BPS Tahun 2024, karena Data BPS Tahun 2025 belum tersedia)	- 91,07%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2025 menggunakan data BPS Tahun 2024 sebesar 3,47 persen, karena data BPS tahun 2025 masih belum rilis , yang berarti bahwa tingkat pengangguran dikabupaten seruyan cenderung semakin kecil, ini bisa disebabkan karena sudah banyak terisi lowongan pekerjaan baik sektor formal maupun informal. Namun bisa juga disebabkan penduduk usia kerja masih banyak yang bersekolah, bisa menjadi ibu rumah tangga atau bisa juga masuk usia lanjut yang disebut sebagai penduduk Bukan Angkatan Kerja.

#### ❖ Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja

No.	Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Tahun 2025
1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke	- 55,80%	- 69,86%	- 125,19%



Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja daerah adalah jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) dibagi jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota dikali seratus persen, jadi persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD tahun 2025 sebesar 159,10% artinya terjadi peningkatan yang signifikan dikarenakan data pembilang dan penyebut diambil dari data buku RTKD, sementara yang sebelumnya data penyebut menggunakan data RKPD Kabupaten Seruyan.

❖ **Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi**

No.	Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Tahun 2025
1.	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	0,75%	1,76%	220%

Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 0,75% karena hanya ada beberapa perusahaan yang terdaftar yang melaporkan jumlah tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi, pada tahun 2025 jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi yang dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan sebanyak 710 orang, sehingga realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 1,76 persen, dengan capaian sebesar 234, 66 persen dari yang ditergetkan sebesar 0,75 persen.

❖ **Tingkat produktivitas tenaga kerja**

No.	Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Tahun 2025
1.	Tingkat produktivitas tenaga kerja	- 0,15%	- 31,30% (Menggunakan data BPS Tahun 2024, karena data BPS Tahun 2025 belum rilis)	- 20,86%

Tingkat produktivitas tenaga kerja dihitung berdasarkan PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) yang di dapat dari Badan Pusat Statistik di bagi jumlah tenaga kerja keseluruhan yang terdaftar di Kabupaten Seruyan pada tahun 2025 belum rilis, sementara memakai data PDRB tahun berjalan (atas harga konstan) tahun 2024, sebesar 31,30 persen, dengan capaian sebesar 20,86 persen.



❖ **Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)**

No.	Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Tahun 2025
1.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	- 21,09%	- 100%	- 474,15%

Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) pada tahun 2025 terelalisasi sebesar 100% melebihi dari yang ditargetkan sebesar 21,09%, dengan capaian sebesar 474,15%.

Dilihat dari pencapaiannya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang hubungan industrial ke perusahaan secara langsung ataupun melalui surat edaran, sehingga dengan mudah mendata Perusahaan yang sudah menerapkan tata kelola kerja yang layak.

**Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota)**

No.	Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Tahun 2025
1.	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota)	- 15,56%	- 1.278,80%	- 8.218,50%

Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota) yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten seruyan pada tahun 2025 sebanyak 1.278,80 persen dari 15,56 persen yang ditargetkan pada tahun 2025, dengan capaian sebesar 8.218,50 persen.

Capaian yang sebesar itu disebabkan oleh adanya pengangkatan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TKD) menjadi PPPK Paruh Waktu pada tahun 2025, dan membuat kartu AK1 tahun 2024, sehingga realisasinya cukup besar dari yang ditargetkan.



**✦ Analisis dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan Tahun 2024**

Penilaian capaian kinerja dilakukan dengan memberikan peringkat/ kategori capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target tahun 2025 yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan sebagai berikut:

**a. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kesempatan kerja**

- **Perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja Tahun 2025**

**Tabel Perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Tahun 2025
- <b>Meningkatnya kualitas kesempatan kerja</b>	- 85%	- 96,52%	- 113,55%

Dengan rumus perhitungan dan analisa sebagai berikut:

- Meningkatnya kualitas kesempatan kerja

$$\frac{\text{Jumlah penduduk yang bekerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$$

$$\frac{87.751}{90.910} \times 100 = 96,52\%$$

Dari tabel diatas dapat diperoleh gambaran bahwa ada peningkatan realisasi dari tahun sebelumnya.



**Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir karena menyesuaikan Renstra tahun 2024-2026**

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	GAP
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas kesempatan kerja	-	12,55 %	- 96,52%	-

- **Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas kesempatan kerja**

No.	Program Tahun 2025	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025
1.	- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja	- Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	- 85 %	- 0 ( Karena anggarannya digunakan untuk pembangunan gedung untuk pelatihan tenaga kerja )	Rp. 824.432.040	Rp. 823.616.915,23
2.	- Program Penempatan Tenaga Kerja	- Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	- 68%	- 2.353/184 X 100 = 1.278,80%	Rp. 52.495.000	Rp. 51.918.600

Untuk mencapai target indikator kinerja sasaran menurunnya pengangguran diupayakan melalui 2 program yaitu:

- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan indikator kinerja program Persentase Tenaga Kerja yang terdaftar yang mendapatkan pelatihan yang ditargetkan 85%. Pada tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan tidak mengadakan pelatihan berbasis kompetensi karena anggaran yang tersedia dipergunakan untuk Pembangunan Gedung untuk pelatihan ketenagakerjaan.
- Program Penempatan Tenaga Kerja dengan indikator kinerja program persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan yang ditargetkan 68% dan tercapai 1.278,80% dikarenakan pada



tahun 2025 Pemerintah Daerah mengangkat Tenaga Kontrak Daerah menjadi PPPK Paruh Waktu sehingga menambah jumlah pencari kerja yang ditempatkan, sedangkan pembuatan Kartu AK1 nya pada tahun 2024.

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan 2025	Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025
1.	- Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	- Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	- 100 Org	- 0	Rp. 820.555.040	Rp. 819.764.915,23
	- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	- Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	- 100 Org	- 0	Rp. 9.701.000	Rp. 9.692.800
	- Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	- Jumlah kesepakatan/ koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun N	- 3 Lembaga	- 1 Lembaga	Rp. 12.148.000	Rp. 11.873.900
	- Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	- Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan	- 20 Unit	- 20 Unit	Rp. 798.706.040	Rp. 798.198.215,23



No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan 2025	Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025
	Kabupaten/ Kota					
2.	- Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	- Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang mendapatkan pembinaan	- 2 lembaga	- 1 lembaga	Rp. 3.877.000	Rp. 3.852.000
	- Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	- Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	- 2 lembaga	- 1 lembaga	Rp. 3.877.000	Rp. 3.852.000
3.	- Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	- Jumlah laporan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	-	-	Rp. 0	Rp.
	- Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	- Jumlah Perusahaan Kecil yang MendapatKonsultasi Peningkatan Produktivitas	-	-	Rp. 0	Rp.
	- Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota	- Jumlah pencari kerja yang mendapatkan kesempatan kerja	- 50 org	- 0	Rp. 560.000	Rp. 560.000
	- Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	- Jumlah pencari kerja yang mendapatkan kesempatan kerja	- 35 org	- 0	Rp. 560.000	Rp. 560.000
4.	- Pengelolaan informasi pasar kerja	- Jumlah laporan pengelolaan informasi pasar kerja	- 2 Dokumen	- 12 Dokumen	Rp. 51.935.000	Rp. 51.358.600



No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan 2025	Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025
	- Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	- Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	- 100 orang	-	Rp. 46.529.000	Rp. 46.017.200
	- Job Fair/ Bursa Kerja	- Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	- 20 Orang	- 4 Orang	Rp. 5.406.000	Rp. 5.341.400

Untuk mencapai target indikator kinerja kegiatan 'Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi dan sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk penyediaan Instruktur tidak dapat dilaksanakan secara optimal, karena keterbatasan anggaran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan pada Tahun 2025 yang bisa direalisasikan hanya pengadaan sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja, Pembangunan Ruang Kelas BLK dan Guest House untuk Instruktur di Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan.

Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil, Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota serta Pelayanan Antar Kerja di daerah Kabupaten Kota dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan, serta Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dengan Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja dan Sub Kegiatan Job Fair/ Bursa Kerja pada tahun 2025 juga tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

Walaupun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan tidak bisa melaksanakan kegiatan pelatihan bersertifikat kompetensi maupun pelatihan kewirausahaan karena keterbatasan anggaran, tapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan masih bisa berperan sebagai pemateri/ narasumber untuk kegiatan pelatihan kewirausahaan pemuda yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan di Desa Telaga Pulang Kecamatan Danau Sembuluh (Foto kegiatan terlampir)



**KEGIATAN PELATIHAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DARI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI KECAMATAN DANAU SEMBULUH TAHUN 2025**



**b. Sasaran 2: Mewujudkan usaha yang menerapkan pembayaran sesuai UMK**

- **Perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja Tahun 2025**

**Tabel Perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025
- <b>Mewujudkan usaha yang menerapkan pembayaran sesuai UMK</b>	100%	100%	100%

Dengan rumus perhitungan dan analisa sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & - \text{Mewujudkan usaha yang menerapkan pembayaran sesuai UMK} \\
 & = \frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan UMK}}{\text{Jumlah perusahaan di Kabupaten Seruyan}} \times 100\% \\
 & = \frac{72}{72} \times 100 = 100\%
 \end{aligned}$$

Pada indikator Mewujudkan usaha yang menerapkan pembayaran sesuai UMK terealisasi 100 persen dari target 100 persen, dengan tingkat capaian sebesar 100 persen. Hal ini artinya pencapaiannya sangat tinggi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan melalui Bidang Hubungan Industrial selalu berupaya untuk mengadakan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan untuk menerapkan tata kelola upah yang layak.

- **Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Mewujudkan usaha yang menerapkan pembayaran sesuai UMK**

No.	Program Tahun 2025	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025
1.	- Program Hubungan Industrial	- Persentase perusahaan yang menerapkan UMK	100%	100%	Rp. 723.195.650	Rp. 722.269.850

Target indikator Persentase perusahaan yang menerapkan UMK tersebut bisa tercapai dikarenakan terus dilakukan pembinaan kepada perusahaan dan pekerja baik melalui surat maupun melalui tatap muka pada kegiatan sosialisasi.



No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan 2024	Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025
1.	- Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah kabupaten/ kota	- Jumlah perusahaan yang mengesahkan PP/PKB	- 10 perusahaan	- 21 perusahaan	Rp. 6.998.0000	Rp. 6.998.000
	- Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan social tenaga kerja serta pengupahan	- Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	- 2 Laporan	- 6 Laporan	Rp. 6.998.000	Rp. 6.998.000
2.	- Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	- Jumlah perusahaan yang ditangani dalam pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/ kota	- 10 perusahaan	- 6 perusahaan	Rp. 716.197.650	Rp. 715.271.850



No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan 2024	Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025
	- Pencegahan perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten/	- Jumlah perselisihan yang dicegah	- 100 Perkara	- 11 Perkara	Rp. 0	Rp. 0
	- Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah kabupaten/ kota	- Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	- 30 Perkara	- 6 Perkara	Rp. 46.200.000	Rp. 45.622.600
	- Pengembangan pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	- Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	- 41.030 Orang	- 36.686 Orang	Rp. 669.997.650	Rp. 669.649.250

Untuk mencapai target indikator kinerja kegiatan 'Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan dapat dilaksnakan secara maksimal walaupun dengan keterbatasan anggaran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan pada Tahun 2025.



Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota dengan Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota juga belum bisa dilaksanakan secara optimal dengan keterbatasan anggaran yang ada di bidang, Sementara untuk Sub Kegiatan Pengembangan pelaksanaan Jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja dapat terlaksana karena mendapatkan anggaran yang bersumber dana pada DBH Sawit yang khusus diperuntukan kepada pekerja rentan.

Adapun kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan pada tahun 2025 adalah Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Seruyan. (Foto kegiatan terlampir)



**RAPAT DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN SERUYAN  
DALAM RANGKA  
PENETAPAN UPAH MINIMUM (UMK) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL  
KABUPATEN (UMSK) TAHUN 2026**





**c. Sasaran 3: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi/eks transmigrasi yang dibina**

- **Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target kinerja tahun 2025**

**Tabel Perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2025**

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025
<b>Persentase Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Transmigrasi/ Eks Transmigrasi yang dibina</b>	75%	74,25%	99%

Persentase Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Transmigrasi/ Eks Transmigrasi yang dibina

Jumlah Penduduk Transmigrasi Sejahtera yang dibina Tahun 2025 dibagi

Jumlah Penduduk Transmigrasi yang dibina Tahun 2025

$$= 260 \text{ KK} : 350 \text{ KK} \times 100\% = 74,28\%$$

Berdasarkan data monografi UPT. Tanggul Harapan tahun 2025 pada Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan yaitu ada 260 kepala keluarga yang meningkat taraf hidupnya atau yang sejahtera yang dibina, dengan pendapatan rata-rata Rp. 4.800.000 per bulan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2025 tidak bisa mengadakan pelatihan dan penyuluhan karena keterbatasan anggaran sehingga belum mampu mencukupi seluruh warga transmigrasi UPT. Tanggul Harapan, untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat transmigrasi secara menyeluruh.



- **Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir**

**Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 s.d Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	2	3	4	5
Persentase Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Transmigrasi/Eks Transmigrasi yang dibina	43,42%	63,57%	73%	

Indikator kinerja Persentase Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Transmigrasi/ Eks Transmigrasi yang dibina pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terjadi peningkatan, walaupun dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, karena banyak Masyarakat transmigrasi yang sudah memiliki Perkebunan kelapa sawit sendiri dan mempunyai usaha dibidang perniagaan dan perbengkelan, sehingga menambah penghasilan mereka dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat transmigrasi secara keseluruhan.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Renstra**

**Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Renstra**

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Renstra Tahun 2025
Persentase Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Transmigrasi/Eks Transmigrasi yang dibina	- 75%	- 75%

Indikator kinerja Persentase Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Transmigrasi/Eks Transmigrasi yang dibina pada Rencana Strategis Dinas ditargetkan 75%, dan sudah tercapai sesuai target. Walaupun dengan keterbatasan anggaran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan pada Tahun 2025.



- **Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Nasional**

**Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Nasional**

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Nasional Tahun 2025
Persentase Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Transmigrasi/Eks Transmigrasi yang dibina	- 75%	Tidak ada

Indikator kinerja persentase peningkatan rata-rata pendapatan transmigran tidak ada pada target nasional pada Pada Perpres RI nomor 72 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025.

- **Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi/ eks transmigrasi yang dibina**

No.	Program Tahun 2025	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025
1.	- Program pembangunan kawasan transmigrasi	- Persentase kawasan permukiman transmigrasi yang dibangun	70%	Tidak ada kawasan transmigrasi yang akan dibangun pada tahun 2025, anggaran yang tersedia hanya untuk koordinasi ke dinas yang terkait	Rp. 83.582.000	Rp. 82.737.131

Target indikator kinerja tersebut tidak bisa tercapai dikarenakan pada tahun 2025 tidak ada kawasan transmigrasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan.



No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan 2025	Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025
1.	- Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	- Jumlah laporan pelaksanaan penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	1 Lokasi	- Tidak ada pelaksanaan penataan yang direalisasikan, hanya koordinasi ke dinas yang terkait.	Rp. 83.582.000	Rp. 82.737.131
	- Koordinasi dan sinkronisasi Kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	- Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kerja sama Pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	- 5 Laporan	- 5 Laporan (SPPD untuk Koordinasi ke Dinas terkait)	Rp. 83.582.000	Rp. 82.737.131

Untuk target indikator kinerja jumlah laporan pelaksanaan penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Kerjasama Pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota ada realisasi kinerja yang berasal dari perjalanan dinas yang dilakukan untuk koordinasi ke dinas terkait.

**C. REALISASI ANGGARAN (AKUNTABILITAS KEUANGAN)**

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan Tahun 2025 sesuai dengan Perjanjian Kinerja/Kontrak Kinerja sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025
1.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	- Tingkat Partisipi	1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 824.432.040	Rp. 823.616.915,23
			2. Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 52.495.000	Rp. 51.918.600
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Kesejahteraan Pekerja	- Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	1. Program Hubungan Industrial	Rp. 723.195.650	Rp. 722.269.850
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Transmigrasi /Eks Transmigrasi yang dibina	- Persentase Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Transmigrasi/ eks Transmigrasi yang dibina	1. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 83.582.000	Rp. 82.737.131



Sumber dana untuk pembiayaan kegiatan adalah APBD Kabupaten Seruyan Tahun 2025 yang penggunaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun total dana APBD yang digunakan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan tahun anggaran 2025 sebesar **Rp. 7.663.455.374,00** dengan perincian realisasi keuangan yang telah dipertanggungjawabkan (telah di SPJ-kan) sebesar **Rp. 7.611.481.352,23** dengan presentase realisasi keuangan 99,4% dan realisasi fisik 100%.

Adapun rincian realisasi belanja tahun 2025 sebagai berikut :

NO.	JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI SPJ
<b>1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>Rp. 6.856.549.683,00</b>	Rp. 6.809.456.087,00
	- Belanja Pegawai	Rp. 4.445.132.795,00	Rp. 4.426.421.187,00
	- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 2.411.416.888,00	Rp. 2.383.034.900,00
<b>2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>Rp. 806.905.664,00</b>	<b>Rp. 802.025.265,23</b>
	- Belanja Modal Peralatan Mesin	Rp. 93.135.400,00	Rp. 91.514.000,00
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 644.480.164,00	Rp. 641.835.097,56
	- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp. 62.290.100,00	Rp. 68.676.167,67
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 7.663.455.374,00</b>	<b>Rp. 7.611.481.352,23</b>



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan sesuai proses perencanaan dalam pelaksanaan kebijakan strategis sampai dengan pengukuran pencapaian sasaran kinerja berdasarkan kegiatan dari misi dan program kerja tahun 2025 telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dan dapat melaksanakan kegiatan dan program dengan baik.

Secara umum permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan di lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan adalah sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai di lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan serta sumber dana kegiatan yang terbatas dan perlu peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia khususnya dibidang yang menangani pelayanan teknis.

#### **B. SARAN**

Mengingat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan terdiri dari satu urusan wajib dan satu urusan pilihan. Untuk peningkatan kualitas SDM dilakukan dengan menambah pengetahuan dan wawasan baik melalui diklat maupun pelatihan. Sehingga apabila hal tersebut terpenuhi, dimungkinkan dapat memacu peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan para pekerja khususnya melalui kegiatan-kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan.